

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN
KEUANGAN: DYSFUNCTIONAL BEHAVIOR SEBAGAI
VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS)**

Oleh:

Dona Primasari¹⁾, Lego Waspodo²⁾, RiniWidianingsih¹⁾

E-mail: dona_primasari@yahoo.com¹⁾

¹ Economics and Business Faculty, Universitas Jenderal Soedirman

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the relationship of effectiveness of regional financial accounting system to the quality of financial accountability, with dysfunctional behavior as moderating variable

This research represents the empirical test which used sensus sampling technics in data collection. Data were collected using a survey of 96 from officer in local government of Banyumas Center of Java, Indonesia. Data analysis uses moderated regression analysis.

The result of the analysis shows: (1) there are positive influence between of effectiveness of regional financial accounting system to the quality of financial accountability, (2) there are positive influence between of effectiveness of regional financial accounting system to the quality of financial accountability mediated by dysfunctional behavior.

Keywords:effectiveness of regional financial accounting system), the quality of information of financial report, dysfunctional behavior

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, daerah diberikan wewenang yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kepada publik. Berdasarkan Undang-undang di bidang keuangan negara tersebut terlihat membawa

implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparansi, partisipatif dan bertanggungjawab. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan good governance (Darise, 2008: 2).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi (Permendagri 13 tahun 2006). Sistem ini menggantikan sistem lama yang selama ini digunakan yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah diterapkan sejak tahun 1981. Implementasi dari Sistem Akuntansi keuangan daerah diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002). Rintangan penting untuk tercapainya kesuksesan dari suatu implementasi sistem yang baru adalah kurangnya perhatian pada faktor perilaku selama implementasi. Selain itu masih sedikit penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor perilaku selama tahap implementasi sistem baru serta pengaruh sistem tersebut terhadap kepuasan dan kinerja (Cavallozo dan Ittner , 2004).

Kesuksesan implementasi sebuah sistem tentu saja tak lepas dari perilaku individu pelaksana sistem tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Lily Sugeng (2009) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan aktivitasnya sering kali terjadi suatu penyimpangan perilaku atau pelanggaran yang disengaja di luar dari aturan dan prosedur sistem pengendalian manajerial pemerintah daerah yang biasanya dilakukan oleh pelaksana SKPD itu sendiri yang disebut sebagai perilaku

dysfunctional (dysfunctional behavior). Penerapan SIKD yang efektif menuntut adanya pemahaman utuh dari pelaksana manajemen keuangan daerah dan adanya penyempurnaan secara terus menerus dari instansi yang berkewenangan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan yang baik (good governance) dapat menjadi kenyataan. Dengan adanya perilaku dysfunctional (dysfunctional behavior) tentu saja akan mempengaruhi negatif implementasi sebuah sistem (Sabaroyeen,2006).

Alasan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada penelitian di bidang Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keperilakuan, terutama penelitian terhadap pengaruh implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap hasil kerja (Work outcomes) dan pengaruhnya terhadap perilaku individu yang dalam hal ini adalah perilaku dysfunctional ((dysfunctional behavior).

1.2.Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian secara spesifik rumusan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah implementasi Sistem Akuntansi Keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan?
2. Apakah perilaku dysfunctional (dysfunctional behavior) memoderasi pengaruh implementasi Sistem Akuntansi Keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerrah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan dimoderasi perilaku dysfunctional mempunyai tujuan sebagai berikut

3. Menganalisis secara empiris mengenai pengaruh sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan?.

4. Menganalisis secara mengenai pengaruh sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan? yang dimoderasi oleh perilaku dysfunctional (dysfunctional behavior)

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem informasi khususnya informasi keuangan daerah dengan menganalisis pengaruh sistem informasi keuangan daerah tersebut terhadap kualitas informasi laporan keuangan? yang dimoderasi oleh perilaku dysfunctional (dysfunctional behavior).

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur teori kontinjensi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan kualitas informasi laporan keuangan

TELAAH TEORITIS DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Teoritis

2.1.1 Pendekatan Teori Kontinjensi

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hubungan antara Teori Kontinjensi dengan implementasi sistem. Premis dari Teori Kontinjensi adalah tidak terdapat sistem pengendalian yang secara universal selalu tepat untuk bisa diterapkan pada seluruh organisasi dalam setiap keadaan. Suatu sistem pengendalian akan berbeda-beda di tiap-tiap organisasi yang berdasarkan pada faktor organisatoris dan faktor situasional (Otley, 1995). Dengan didasarkan pada pendekatan kontinjensi maka ada kemungkinan terdapat variabel penentu lainnya yang saling berinteraksi, selaras dengan kondisi tertentu yang dihadapi.

Penggunaan teori kontinjensi pada konsep kesesuaian dalam menunjukkan tingkat kesesuaian antara faktor-faktor kontekstual (kontinjensi) dan sistem akuntansi manajemen akan memungkinkan manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Riyanto, 2001). Menurut Otley (1980) organisasi menghadapi

kondisional agar terbentuk konfigurasi yang sesuai sehingga diharapkan menghasilkan efektifitas organisasi dan peningkatan kinerja organisasi.

2.2. Hipotesis

2.2.1 Hubungan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas informasi laporan keuangan

Hall (2004: 151) mengungkapkan bahwa, *“The quality of information generated by the accounting information system impacts management’s ability to take actions and make decisions in connection with the organization’s operations and to prepare reliable financial statements”*. Sedangkan Mulyadi (2001: 19) mengkaitkan tujuan pengembangan sistem akuntansi tidak lain adalah untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2004).

Hal ini sejalan dengan pendapat Darise (2008) yang menyatakan bahwa keandalan (reliability) informasi keuangan yang disajikan dalam perhitungan anggaran juga sangat rendah karena sistem akuntansi yang diselenggarakan belum didasarkan pada standar akuntansi dan tidak didukung oleh perangkat data dan proses yang memadai. Hal serupa diungkap oleh Mulyadi (2001) bahwa tujuan umum pengembangan sistem akuntansi diantaranya adalah untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru dan untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dapat dirumuskan:

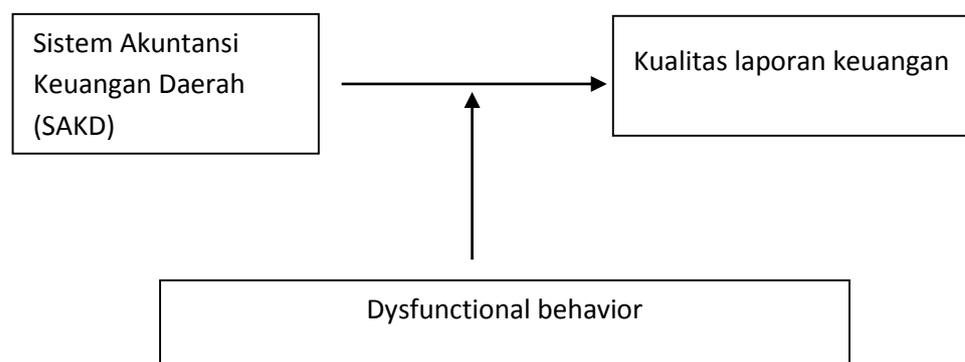
H1: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang semakin efektif akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan.

2.2.2. Hubungan implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), perilaku dysfunctional (dysfunctional Behavior) dan kualitas laporan keuangan

Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak akan sukses jika tidak dibarengi dengan perilaku individu (pegawai) yang mendukung implementasi sistem tersebut. Menurut Jaworski dan Young (1992: 18) perilaku dysfunctional dapat didefinisikan sebagai "suatu tindakan dimana dilakukan usaha yang kurang maksimal dengan memanipulasi elemen-elemen sistem pengendalian dengan tujuan yang dikehendaki. Logikanya implementasi suatu sistem terhadap kinerja tidak akan efektif bila dipengaruhi oleh faktor dysfunctional behavior. Mengacu pada penelitian Soobaroyen (2006) yang membuktikan bahwa dysfunctional behavior secara langsung berpengaruh negatif terhadap kinerja, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : dysfunctional behavior memoderasi secara negatif pengaruh implementasi Sistem Informasi Akuntansi Daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan

Gambar 2.1
Model Penelitian



METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para Pegawai Daerah yang di Kabupaten Banyumas. Adapun sampel yang digunakan terdiri atas aparat pemda yang terlibat dalam rekonstruksi rancangan dan penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SIKD) meliputi kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, kepala seksi, staff keuangan dan administrasi yang berkaitan dengan implementasi dan penggunaan SIKD (M.Syafuddin, 2005) di Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sensus sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil semua sampel yang ada.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mail survey melalui penyebaran kuesioner dan mendatangi langsung wilayah sampel dalam penelitian yang dapat dijangkau (personally administered questionnaire). Bentuk kuesioner terdiri dari kuesioner dengan pertanyaan terkait (angket terstruktur).

3.3. Teknik Analisa Data

3.3.1 Uji Kualitas Data

Uji konsistensi internal (reliabilitas) ditentukan dengan koefisien cronbach alpha. Suatu konstruk atau instrumen dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha di atas 0,60 (Nunnally, 1967 dalam Imam, 2005). Uji homogenitas data (validitas) dengan uji person correlation. Jika hasilnya signifikan maka data dikatakan valid.

3.3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

5.3.3 Uji Asumsi Klasik

Sehubungan dengan penggunaan metode regresi berganda (multiple regression) maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdapat dalam regresi berganda sebagai berikut:

3. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen pada model regresi (Imam, 2002). Uji ini dapat melihat besaran nilai VIF dan tolerance. Pedoman yang digunakan untuk suatu model regresi yang bebas multikolonieritas adalah nilai VIF semua variabel independen dibawah nilai 10 dan nilai tolerance di atas 0,1 (Hair, 1998).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) (Imam, 2002). Uji ini dilakukan dengan melihat hasil Durbin Watson:

- a jika $d < d_L$ atau $d > (4 - d_L)$ maka terdapat autokorelasi.
- b jika d terletak antara d_U dan $(4 - d_U)$ maka tidak ada autokorelasi.
- c jika d terletak antara d_L dan d_U atau diantara $(4 - d_U)$ dan $(4 - d_L)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas

atau tidak terjadi heterokedastisitas (Imam, 2002). Deteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada grafik plot (scatterplot) antara nilai prediksi variabel terkait dengan residualnya.

3.3.4 Uji Hipotesis

Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan berganda sebagai model yang memprediksi hubungan kausal antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Regresi linear sederhana untuk menguji hubungan antara Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan kinerja pegawai dan menguji hubungan variabel moderating (dysfunctional behavior) dengan kinerja pegawai. Moderated regression analysis (MRA) digunakan untuk menentukan hubungan interaksi antara variabel oleh satu variabel sebagai variabel moderating (Nunnally, 1994). Persamaan statistika yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KLK = a + b_1 SAKD + e \dots\dots\dots$$

(1)

$$KLK = a + b_1 SAKD + b_2 DB + b_3 SAKD * DB + e \dots\dots\dots$$

(2)

Dimana:

KLK = Kualitas Laporan Keuangan

SAKD = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

DB = Dysfunctional Behavior

a = intercept

e = error

Jika variabel DB merupakan variabel moderator, maka koefisien b3 harus signifikan pada 0,05 atau 0,10.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

4.1.1. Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Kuesioner disebarakan dengan cara melalui antar langsung kepada responden. Kuesioner diinggal kemudian diambil kembali sesuai dengan janji yang telah disepakati dengan responden. Waktu yang diperlukan untuk pengumpulan data selama 1 bulan dimulai dari 1 Septemer 2015 sampai dengan 30 September 2015. Kuesioner yang disebarakan berjumlah 143 kuesioner dan yang dikembalikan sejumlah 110 kuesioner, dengan tingkat respon rate sebesar 76,9%. Sebanyak 14 kuesioner tidak dapat diikutsertakan dalam analisis karena pengisian yang tidak lengkap, oleh karena itu jumlah data yang bisa diolah untuk analisis adalah sebanyak 96 kuesioner. Secara lengkap data akan disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini :

TABEL 4.1

RINCIAN PENGIRIMAN PENGEMBALIAN KUESIONER

Keterangan	Jumlah Kuesioner
- Kuesioner yang didistribusikan	143 kuesioner
- Kuesioner yang diterima (kembali)	110 kuesioner
- Kuesioner yang tidak kembali	33 kuesioner
- Kuesioner yang gugur (tidak lengkap pengisiannya) sehingga tidak dapat diolah	14 kuesioner
- Kuesioner yang lengkap	96 kuesioner
- Tingkat pengembalian (respon rate)	$(110 / 143) * 100\% = 76,9\%$
- Tingkat pengembalian yang bisa digunakan	$(96 / 143) * 100\% = 67,1\%$

Sumber : Data diolah, 2015

4.1.2. Gambaran Umum Responden

TABEL 4.2

PROFIL RESPONDEN

Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Pria	65	67,7%
Wanita	31	32,2%
Pendidikan		
D3	11	11,4%
S1	71	73,9%
S2	12	12,5%
S3	2	2,0%
Lama bekerja		
Dibawah 3 tahun	30	31,2%
Diatas 3 tahun	66	68,8%

Sumber : Data diolah, 2015

4.2. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data meliputi realibilitas dan uji validitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji cronbach alpha menggunakan SPSS. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha $>0,60$ (Nunnally, 1967 dalam Imam, 2005). Hasil secara lengkap uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 2 SPSS. Berikut ini adalah rekapitulasi hasil uji reliabilitas dan validitas yang disajikan pada tabel 4.3 dan tabel 4.4.

Tabel 4.3

Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
1	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,62	Reliabel
2	Dysfunctional behavior	0,70	Reliabel
3	Kualitas Laporan Keuangan	0,64	Reliabel

Sumber: data primer diolah 2015

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Kisaran Korelasi	Signifikansi	Keterangan
1	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,660**-0,719**	0,001	Valid
2	Dysfunctional behavior	0,744**-0,832**	0,001	Valid
3	Kualitas Laporan Keuangan	0,671**-0,783**	0,001	Valid

Sumber: data primer diolah 2015

4.2.1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data menunjukkan besar nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1,101 dan signifikan pada 0,177 yang berarti H_0 diterima yaitu data residual terdistribusi secara normal.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

Sehubungan dengan penggunaan metode regresi berganda (multiple regression) maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdapat dalam regresi berganda sebagai berikut:

7. Uji Multikolonieritas

Hasil perhitungan nilai Tolerance juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya $> 95\%$. Hasil perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10 . jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4.5**Hasil Uji Multikolonieritas**

Variabel	Nilai t	Sig	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
SAKD	5.456	.000	.879	1.337
DB	.198	.068	.879	1.337

Dependent Variable: KLK

8. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,150, nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan nilai signifikansi 0,01, jumlah sampel 101 (jumlah sampel 101 karena kurang dari 150 lebih mendekati pada 100) dan jumlah variabel independen 2 ($k=2$) maka diperoleh nilai d_L sebesar 1,503 dan d_U sebesar 1,583. Jadi dapat dikatakan bahwa DW 1,150 lebih kecil dari batas atas (d_U) 1,583 dan kurang dari $4-1,503$ ($4- d_U$), sehingga dapat diartikan bahwa terdapat autokorelasi positif. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu.

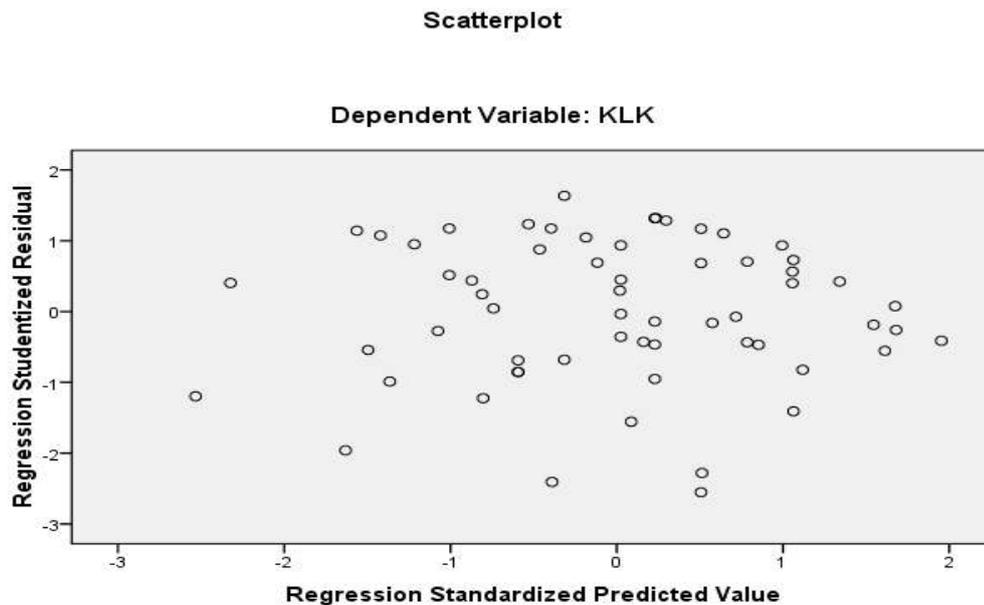
Tabel 4.6**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of	Durbin Watson
1		.234	.218	5.776	1.150

Sumber: data primer diolah 2015

9. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil grafik plot (scatterplot) menunjukkan bahwa tidak terdapat pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi.



Gambar 1 hasil uji Heteroskedastisitas

4.3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang dirumuskan sebelumnya.

- a. Sistem akuntansi keuangan daerah yang semakin efektif akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan (H1)

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan melihat interaksi antara variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan kualitas informasi laporan keuangan (persamaan 1). Adapun hasil pengujian menunjukkan besarnya adjusted R^2 adalah 0,183, hal ini berarti 18,3 % variasi kualitas informasi laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, sedangkan sisanya 81,7% dijelaskan oleh

sebab-sebab yang lain di luar model. Dari model regresi tampak variabel sistem akuntansi keuangan daerah signifikan pada 0,05, hal ini berarti bahwa variabel kualitas informasi laporan keuangan dipengaruhi oleh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

- b. Dysfunctional behavior memoderasi secara negatif pengaruh implementasi Sistem Akuntansi Keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan (H2).

Pengujian hipotesis 2, dilakukan dengan uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA) yang merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Hasil pengujian hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan variabel interaksi yang merupakan interaksi antara Sistem Akuntansi Keuangan daerah dan dysfunctional behavior juga signifikan. Hasil output SPSS terlihat jelas bahwa variabel interaksi memberikan koefisien -0.023 dan signifikan pada 0.0000 yang berarti variabel dysfunctional behavior adalah pure moderator atau variabel moderating. Ringkasan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.7 dan 4.8.

Tabel 4.7

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis	Adjusted R Square	Uji Signifikansi Simultan		Uji Signifikansi Parameter		Keterangan
		F	Sig	t	Sig	
H1 SAKD - KLIK	0,183	-	-	7,732	0,000	Berpengaruh

Tabel 4.8
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis	Adjusted R Square	Unstandardized Coefficients		Uji Signifikansi Parameter		Keterangan
		B	Std. Error	t	Sig	
H2	0,249					
SAKD		2.215	.417	4.778	.000	Berpengaruh
INTERAKSI		-.023	.014	-2.136	.022	Berpengaruh

Sumber: data primer diolah 2015

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Keterangan
H1 Sistem akuntansi keuangan daerah yang semakin efektif akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan	Diterima
H2 Dysfuntional behavior memoderasi secara negatif pengaruh implementasi Sistem Akuntansi Keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan	Diterima

Sumber: data primer diolah 2015

PEMBAHASAN

- 4.4.1.** Sistem akuntansi keuangan daerah yang semakin efektif akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan

Teori yang dikemukakan Macintosh (1994) bahwa penerimaan implementasi sistem merupakan bagian yang sangat penting dalam spektrum mekanisme kontrol keseluruhan yang digunakan untuk memotivasi, mengukur, dan memberi sanksi tindakan-tindakan para manajer dan karyawan organisasi. Adanya penerimaan implementasi sistem mampu meningkatkan perencanaan dan kontrol aktivitas organisasi dengan lebih baik sehingga meningkatkan hasil kerja yang baik.

Pengaruh langsung variabel efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan dapat diartikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan dengan efektif secara statistik dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan kabupaten/kota di Kabupaten Banyumas. Sistem akuntansi merupakan sistem pembagian kekuasaan dalam organisasi. Dalam lingkungan pemda penerimaan implementasi SAKD akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya dalam proses pengelolaan data keuangan, mulai dari catatan akuntansi sampai dengan penyajian informasi dalam laporan keuangan. Konsekuensi penerimaan implementasi SAKD dapat membantu pekerjaan lebih efisien selaras dengan kesesuaian tugas, sehingga disimpulkan bahwa penerapan SAKD yang efisien akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil sebuah pemikiran yang mendasar mengenai upaya untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara efektif sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, dengan sistem akuntansi yang telah berjalan efektif akan menyebabkan pengendalian intern berjalan semakin baik sehingga diharapkan dapat memunculkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, dan tentu saja hal tersebut akan mendorong meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Hunton (1996), Arbenethy dan Jan Bouwens (2005).

4.4.2. Dysfuntional behavior memoderasi secara negatif pengaruh implementasi Sistem Akuntansi Keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan

Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak akan sukses jika tidak dibarengi dengan perilaku individu (pegawai) yang mendukung implementasi sistem tersebut. Menurut Jaworski dan Young (1992: 18) perilaku dysfunctional dapat didefinisikan sebagai "suatu tindakan dimana dilakukan usaha yang kurang maksimal dengan memanipulasi elemen-elemen sistem pengendalian dengan tujuan yang dikehendaki. Logikanya implementasi suatu sistem terhadap kualitas informasi laporan keuangan tidak akan efektif bila dipengaruhi oleh faktor dysfunctional behavior. Adanya tindakan-tindakan manipulatif akan menghambat proses kerja para pegawai dan mempengaruhi hasil akhir laporan berupa laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dysfunctional behavior adalah pure moderator atau variabel moderating. Dysfunctional behavior memoderasi secara negatif pengaruh implementasi Sistem Akuntansi Keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Soobaroyen (2004) dan Wiyantoro (2006) yang membuktikan bahwa dysfunctional behavior secara langsung berpengaruh negatif terhadap kinerja.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berlatar belakang pada pentingnya implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam penilaian hasil kerja yang dilihat dari kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh dysfunctional behavior. Hasil penelitian mendukung bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Banyumas dan mendukung variabel Dysfunctional behavior memoderasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan, dengan kata lain disebut sebagai variabel moderating. Penelitian ini memberikan indikasi pentingnya implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen dan menilai prestasi hasil dari proses kerja.

5.2 Keterbatasan

Evaluasi atas hasil penelitian ini harus mempertimbangkan beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, antara lain:

5. Keandalan validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini nampak belum teruji dengan baik, karena terdapat beberapa indikator yang dieliminasi (validasi) meskipun telah dilakukan pilot study. Peneliti menduga kemungkinan adanya faktor lain yaitu penerjemahan yang kurang baik, terutama setting bahasa yang sesuai dengan kondisi responden di Indonesia.
6. Penggunaan instrumen berupa persepsi akan menimbulkan masalah jika persepsi tersebut berbeda dengan keadaan sebenarnya.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka dikemukakan beberapa dalam penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di perusahaan manufaktur, dimana karakteristik objek di pemerintahan berbeda dengan perusahaan manufaktur.
2. Perlu dilakukan pengembangan instrument yaitu disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan dari objek yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abernethy, M. A., and A. M. Lillis, 'Interdependencies in Organization Design: A Test in *Hospitals*', *Journal of Management Accounting Research*, Vol. 13, 2001.
- Abernethy, M. A., and Jan Bouwens, 'Determinants of accounting innovation', *ABACUS*, vol, 2005.
- Aghion, P., and J. Tirole, '*Formal and Real Authority in Organizations*', *Journal of Bolton, P., and M. Dewatripont, 'The Firm as a Communication Network*', *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 109, No. 4, 1994.

- Ayu Oktaviani, Desentralisasi Pengambilan Keputusan, Pengendalian Akuntansi dan Kinerja Kantor Dinas, Program studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Cetakan I. Jakarta: PT Indeks.
- David Eendi, 2001, "Pengaruh Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajer Dengan Ketidakpastian Tugas Sebagai Variabel Moderating", Tesis Magister Sains Akuntansi Undip Semarang (Tidak Dipublikasikan)
- Chenhall, R.H. 2003. *"Management Control Systyems Design within its Organazional Contex: Findings from Contijency-based Reseach and Directions for the Future"*. Accounting, Organizations and Society 28:127-168
- Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Govindrajan, V. 1986. *"Impact of Participation in the Budgetary Process on Managerial Attitudes and Performance: Universalistic and Contingency Perspectives"*. Decision Sciences 17:496-516
- Hall, R. 1978. Organizations: Structure and Process. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall.
- Jaworski, B.J., and S.M. Young. 1992. *"Dysfunctional Behavior and Management Control: An Empirical Study of Marketing Managers"*. Accounting, Organizattion and Society 17 (1): 17-35
- Josept G. Fisher, 1998. *"Contingency Theory, Management Control Systems and Firm Outcomes: Past Result and Future Directions"*. Behavior Research in Accounting, 10, 47-64
- _____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- _____. PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Primasari Dona, Isbandriyati Mutmainah, "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dengan tiga variabel moderating (studi empiris pada BPR se Kabupaten Bogor)". Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan (JRAK) Universitas Muhamammadiyah Malang

Primasari, Wasposito, Rahman. Variabel Antecedent dan Konsekuensi Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Studi Empiris pada BAKORWIL IV Propinsi Jawa Tengah, SNA 11. Pontianak, 2008.

Scott, S. G., and R. A. Bruce, 'Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of

Individual Innovation in the Workplace', *Academy of Management Journal*, Vol. 37, No. 3, 1994.